

POLA KOMUNIKASI POLITIK SALMIAH RAMBE DALAM MEMPERTAHANKAN ELEKTABILITAS MENUJU PEMILU 2024

Affah Nur Azka S¹, Didin Sabarudin²

afifazka13@gmail.com¹, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
didinsabarudin@ukri.ac.id², Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Abstract. *Salmiah Rambe, as a member of the Bandung City Regional Representative Council (DPRD Kota Bandung), has held a position in Commission D for two terms beginning in 2014. She has a personal responsibility in maintaining her high level of electability in the previous 2019 elections. Salmiah's vote count in the 2019 elections increased almost threefold compared to the 2014 elections. In 2014, she received 4,219 votes, while in 2019 she received 11,074 votes. This is quite surprising considering her last name suggests a different cultural background than the area she is assigned to represent. The high level of electability needs to be maintained because it represents a trust given by the community and also indicates Salmiah's ambition to participate in the next 2024 elections. This research aims to determine the political communication pattern used by Salmiah Rambe in maintaining her electability towards the 2024 elections, and how this political communication pattern can help her. This study uses a qualitative descriptive approach. The results of the data from the field show that Salmiah uses a circular political communication pattern, as proposed by Scharm and Osgood, which aligns with the political communication model developed by Dan Nimmo. Salmiah uses this communication pattern in every activity that allows her to meet with the community. It helps her understand the concerns and complaints of the community/constituents, so she can respond to these complaints with appropriate policies and assistance needed by the community/constituents. These policies and assistance bring benefits that are perceived by the community/constituents, which ultimately influence the trust of the community/constituents and affect Salmiah Rambe's level of electability.*

Keywords: *Political Communication, Salmiah Rambe, Electability.*

Abstrak. Salmiah Rambe sebagai anggota DPRD Kota Bandung yang telah menjabat di kursi Komisi D selama dua periode terhitung dari periode 2014, memiliki amanah tersendiri dalam menjaga tingkat elektabilitasnya yang cukup tinggi pada Pemilu 2019 silam. Raihan suara Salmiah di Pemilu 2019 meningkat sebanyak hampir tiga kali lipat dari pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2019 ia meraih hingga 11.074 suara sedangkan pada Pemilu 2014 ia meraih 4.219 suara. Hal tersebut cukup mengejutkan karena dengan marga nama yang dibawanya menunjukkan bahwa ia berlatar belakangan budaya yang berbeda dari daerah yang sedang ditugaskan padanya. Tingginya tingkat elektabilitas tersebut perlu dijaga karena di dalamnya terdapat amanah yang diberikan oleh masyarakat dan apabila ia memiliki ambisi dalam mengikuti kontestasi pada Pemilu 2024 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi politik apa yang digunakan oleh Salmiah Rambe dalam mempertahankan elektabilitasnya menuju Pemilu 2024 dan bagaimana pola komunikasi politik tersebut dapat membantunya. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil data di lapangan menunjukkan bahwa pola komunikasi politik yang Salmiah gunakan adalah pola komunikasi politik sirkuler yang dikemukakan oleh Scharm dan Osgood, yang mana pola tersebut selaras dengan model komunikasi politik yang Dan Nimmo kembangkan. Pola komunikasi tersebut Salmiah gunakan pada setiap kegiatan yang memungkinkan ia bertemu dengan masyarakat, karena pola komunikasi tersebut

membantunya mengetahui apa yang menjadi keresahan dan aduan masyarakat/konstituen, sehingga ia dapat menjawab aduan tersebut dengan kebijakan dan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat/konstituen. Kebijakan dan bantuan tersebut membawa kebermanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat/konstituen sehingga menimbulkan pengaruh pada kepercayaan masyarakat/konstituen yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat elektabilitas Salmiah Rambe.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Salmiah Rambe, Elektabilitas.

LATAR BELAKANG

Anggota badan legislatif pusat maupun daerah memiliki peranan dan wewenang yang cukup kuat dalam mewujudkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, mereka diberi kuasa untuk menjadi wakil rakyat. Para anggota legislatif diharuskan memiliki daya cakup yang cukup tinggi dalam menunjukkan citra untuk menggaet kepercayaan rakyat, khususnya masyarakat di daerah pemilihannya. Hal tersebut jugalah yang telah dan selalu diupayakan oleh Salmiah Rambe, anggota DPRD Kota Bandung yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Salmiah berhasil mempertahankan kursi legislatif hingga dua periode, ia berhasil memenangkan Pemilu Legislatif 2014 dan 2019.

Merujuk pada Undang-Undang 32/2004, sebagaimana telah diubah menjadi UU 23/2014 menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, maka kata pemerintahan menunjuk pada lembaga eksekutif dan legislatif. Untuk menduduki kursi pemerintahan, persaingan antar calon legislatif akan begitu terasa. Pada Pemilu 2019 silam, alokasi kursi dapil 2 berjumlah 8 kursi diperebutkan oleh kurang lebih 119 calon anggota legislatif. Salah satu hal yang menjadi sorotan peneliti pada perolehan suara tersebut adalah sosok Salmiah Rambe itu sendiri yang apabila dilihat dari marga nama yang dimilikinya menunjukkan bahwa ia bukan penduduk asli Kota Bandung. Namun Salmiah Rambe mampu menggaet banyak suara dan bahkan bertahan hingga dua periode. Raihan suara yang cukup tinggi tersebut juga tiada lain karena upaya yang dilakukan oleh Salmiah Rambe beserta tim suksesnya dalam mempertahankan tingkat elektabilitas dan mengajak masyarakat untuk mendukung Salmiah Rambe. Ketika berbicara mengenai pemilu legislatif maka yang berperan besar pada saat kampanye adalah pergerakan-pergerakan yang dilakukan tim sukses di setiap daerah pemilihan. Salmiah Rambe dituntut untuk menjalin hubungan yang cukup erat dan dekat dengan tim suksesnya agar segala bentuk koordinasi dapat berjalan dengan baik.

Salmiah Rambe menduduki komisi D yang meliputi beberapa bidang di antaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan keagamaan. Dengan menduduki posisi tersebut ia sering bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk berkomunikasi dalam menyampaikan program kerja dan peraturan daerah yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung. Menjadi tamu undangan sekaligus komunikator dalam berbagai kesempatan ia memanfaatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa program Pemerintah Kota Bandung dapat dimanfaatkan. Melihat pada jumlah periode yang telah ia duduki di bangku kekuasaan, menggambarkan bagaimana kinerja Salmiah Rambe selama ini.

Cara kerja Salmiah Rambe yang seringkali turun untuk bersentuhan langsung dengan berbagai lapisan masyarakat perihal program Pemerintah Kota Bandung yang juga dimanfaatkan untuk tujuan politik dalam meningkatkan peluang dukungan massif. Hal tersebut merujuk pada model komunikasi politik interaksional yang menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses dimana partisipan komunikasi saling bertukar posisi sebagai pengirim dan penerima pesan yang membentuk makna bersama (Schramm, 1997, <https://pakarkomunikasi.com/model-komunikasi-interaksional>). Sentuhan kepada beragam

lapisan masyarakat, mendekatkan Salmiah pada tujuan politisnya menjadi salah satu faktor kuat dalam menggaet banyak suara. Kajian ini memiliki kebaruan spesifik mengeksplorasi penemuan pola komunikasi di antara anggota legislatif yang maju kembali sebagai calon anggota legislatif dibandingkan dengan fokus penelitian terdahulu tentang strategi komunikasi politik (Anwar, 2015; Siregar, 2017; dan Jone, 2020), komunikasi politik terkait ideologi (Nurussa'adah, 2017), dan komunikasi politik melalui media sosial (Supit et.al, 2022).

KAJIAN TEORITIS

Komunikasi berperan sangat penting dalam interaksi kehidupan manusia sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang (komunikator) dan menstimulasi lawan bicaranya (komunikan) untuk kemudian mendapatkan respon, baik dalam bentuk *feedback* (umpan balik) maupun pembentukan atau perubahan perilaku. Effendy (1989:60) mengungkapkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan, dan sebagainya, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik langsung secara tatap muka maupun tak langsung melalui media dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau perilaku. Sedangkan komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin mempunyai banyak pengertian dan makna sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang memberi pengertian. Sehingga komunikasi dapat diartikan dalam perspektif sosiologi, psikologi, psikologi sosial, antropologi, politik, dan sebagainya (Nurudin et.al, 2013:5).

Komunikasi politik dalam kajian komunikasi dipahami sebagai pesan bercirikan politik untuk memengaruhi pihak lain dalam pencapaian tujuan yang direncanakan (Heryanto & Rumar, 2013:2). Komunikasi politik sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Dengan demikian, inti dari komunikasi politik adalah mengarahkan komunikasi untuk mencapai suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga pesan atau informasi yang dibahas dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu. Dapat dikatakan komunikasi politik merupakan upaya sekelompok orang yang memiliki orientasi, ideologi, atau pemikiran politik tertentu dalam rangka untuk menduduki bangku kekuasaan agar nantinya memiliki hak dan wewenang yang dapat dijadikan kendaraan dalam mencapai tujuan politik.

Menurut Effendi (1993:30) pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautan unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis. Komunikasi politik bukanlah spesifikasi ilmu yang terpisah dari model komunikasi pada umumnya, namun merupakan salah satu turunan dari ilmu komunikasi, maka pola-pola yang ada pada komunikasi politik mengikuti pada pola-pola yang ada di ilmu komunikasi umumnya. Sedangkan bentuk pola komunikasi politik (Nimmo, 2007) adalah: 1). Pola Komunikasi Primer, 2). Pola Komunikasi Sekunder, 3). Pola Komunikasi Linear, dan 4). Pola Komunikasi Sirkular.

Menghadapi kontestasi pemilu legislatif 2024, komunikasi politik dilakukan oleh calon yang berlaga untuk meningkatkan elektabilitas sebagai tingkat keterpilihan seseorang dilihat dari kesesuaian kriteria keterpilihan, seperti bagaimana ia dikenal baik oleh masyarakat luas, memiliki rekam jejak, prestasi, dan terbukti memiliki kinerja yang baik dengan pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau perwakilan berdasarkan suara mayoritas terbanyak (KBBI, 2016).

METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini berupa fenomenologi untuk menelusuri komunikasi politik yang dilakukan oleh Salmiah Rambe sebagai anggota legislatif kota Bandung dalam

mempertahankan elektabilitasnya pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan penelitian paradigma konstruktivis yang berpandangan bahwa realitas bukanlah hal yang natural, melainkan rancangan dan bentukan dari hasil konstruksi dengan menitikberatkan pada bagaimana dan dengan cara apa peristiwa atau relitas dibentuk atau dikonstruksi (Rakhmat & Ibrahim, 2016:29) dalam hal ini komunikasi politik Salmiah Rambe.

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif berjenis deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati (Moleong, 2001:3) dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman secara umum terhadap kondisi sosial yang di mana pemahaman ini hasil dari analisis kenyataan sosial, bahwa komunikasi politik yang digunakan dan dijalankan oleh Salmiah Rambe tidak dapat dilihat secara tunggal, namun banyak faktor dan aspek yang dapat memengaruhi realitas yang terjadi untuk memperoleh suara pada Pemilu 2024.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan atau observasi dilakukan untuk melacak secara sistematis dan langsung komunikasi politik (Heryanto & Rumaru, 2013:141), pada sosok Salmiah Rambe terkait dengan persoalan-persoalan penting. Persoalan-persoalan tersebut seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, konflik, pola pengaruh, pola-pola pencarian informasi, dan pola-pola penggunaan media massa, serta kemungkinan komplementaritasnya dengan sumber-sumber personal. Selain itu, wawancara merupakan kegiatan penggalian informasi yang dilakukan secara tanya jawab dengan narasumber sebagai subjek (pelaku, aktor) berlangsung selama tiga bulan (April-Juni 20023) sehubungan dengan realitas atau gejala yang diteliti (Pawito, 2009:69).

Desain penelitian dikonstruksi dalam semua proses sebagai sebuah rancangan kegiatan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menemukan sebuah penyelesaian suatu masalah yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Herdayati & Syahrial, 2019), yang membantu penelitian dalam pengumpulan dan menganalisis data komunikasi politik Salmiah Rambe mempertahankan kursi legislatif pada Pemilu 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi Politik Salmiah Rambe dalam Mempertahankan Elektabilitas

Cara berkomunikasi politik politisi secara umum menyesuaikan dengan gaya setiap komunikator yang ditengarai penting untuk mengidentifikasi karakteristik aktor politik, seperti diungkapkan oleh Magstadt (dalam Perwironegoro, 2018) bahwa sekurangnya terdapat 4 model gaya komunikasi politik, yaitu: *negarawan*, *politisi*, *demagog*, dan *citizen leader*. Karakteristik Salmiah termasuk ke dalam aktor politik yang menggunakan gaya komunikasi politik *negarawan*. Setidaknya Salmiah memenuhi tiga karakteristik yang ada. Karakteristik yang pertama yaitu mengejar kebaikan umum, pada temuan di lapangan Salmiah sering kali membuka diri terhadap masyarakat atau konstituen untuk mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan dan kebutuhan di tengah kehidupan masyarakat, kendati tidak semua permasalahan dapat ia selesaikan namun sebisa mungkin ia akan membantu, sesuai dengan visi yang ia miliki dalam berpolitik yaitu “memperjuangkan kepentingan masyarakat dan umat, untuk kebaikan serta keselamatan dunia akhirat”.

Karakteristik yang kedua adalah kebijaksanaan yang praktis, untuk mewujudkan visi yang dimiliki maka Salmiah melakukan upaya mendekatkan diri kepada masyarakat dengan berkomunikasi secara langsung untuk mengetahui aduan masyarakat sehingga Salmiah dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kebijakan-kebijakan apa yang menjadi darurat bagi masyarakat seperti salah satu contohnya adalah darurat LGBT, Salmiah mendapat undangan audiensi dari beberapa kalangan masyarakat mengenai keresahan mereka terhadap perilaku penyimpangan seksual yang kian meningkat di Bandung, audiensi itu

dilakukan di DPRD Kota Bandung pada 15 Februari 2023 silam. Adanya keresahan tersebut Salmiah bersama dengan rekan kerjanya mulai mempertimbangkan terkait rancangan peraturan daerah anti LGBT atau pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang, hingga saat ini Salmiah masih mendorong agar raperda tersebut segera disahkan. Karakteristik yang ketiga adalah keahlian politik, dengan menjabat sebagai Anggota DPRD selama dua periode membuktikan bahwa Salmiah memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam berpolitik, bagaimana ia dapat menjalankan fungsinya sebagai Anggota DPRD selama kurang lebih 9 tahun tanpa terdengarnya rekam jejak yang buruk.

Gaya komunikasi politik yang Salmiah gunakan selaras dengan kewajibannya dalam menjabat sebagai pemangku kebijakan, sehingga kedua hal tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Bagaimana untuk melakukan tugas dan fungsi legislasi Salmiah harus mengetahui betul kebutuhan masyarakat, dan untuk melakukan pengawasan serta anggaran diperlukan keahlian berpolitik yang mumpuni agar dapat teliti dan cekatan dalam mengawasi. Selain tugas dan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, Salmiah Rambe selaku anggota dewan memiliki kewajiban untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2020 tentang kode etik, Pasal 7 ayat 10 mengenai kewajiban sebagai Anggota DPRD. Kewajiban tersebut menuntut Salmiah untuk tetap bersentuhan dengan masyarakat atau konstituen karena ia merupakan wakil rakyat yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang telah ada dan mengakomodir aduan masyarakat, sehingga komunikasi yang baik dengan masyarakat akan sangat membantunya dalam bekerja di bangku legislatif.

Jumlah 11 ribu suara yang Salmiah raih di Pemilu 2019 merupakan tanggung jawab yang harus diemban dan dituntaskan demi menjaga tingkat keterpilihan yang telah dimiliki. Pada temuan di lapangan, Salmiah Rambe berkomunikasi dengan masyarakat atau konstituen melalui berbagai jenis kegiatan, baik formal maupun non-formal. Komunikasi yang dijaga tersebut merupakan upaya yang ia lakukan dalam menjaga kinerjanya sebagai anggota dewan. Pendekatan komunikasi politik yang Salmiah gunakan adalah dengan berusaha terus hadir bagi masyarakat. Setiap undangan kegiatan yang masuk melalui sekertaris timnya, Salmiah selalu mengupayakan kehadirannya. Diundang sebagai pembicara merupakan sebuah peluang bagi Salmiah dalam membuka jalan untuk berkomunikasi dengan masyarakat/konstituen secara informal karena ketika acara usai, tak jarang Salmiah mendekati masyarakat untuk berbincang dan melalui momentum itu masyarakat/konstituen akan menyampaikan aduan terkait keresahan dan kebutuhannya. Dengan menghadiri kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan meningkatkan efektifitas komunikasi politik yang Salmiah gunakan karena ia akan dengan mudah mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dan kesulitan yang dirasakan oleh masyarakatnya.

Keberagaman kegiatan yang dikunjungi menghasilkan beberapa klasifikasi pesan yang Salmiah sampaikan. Pada kegiatan formal instansi pemerintahan seperti kegiatan reses, musyawarah pembangunan, atau tugas dinas lainnya biasanya isi pesan yang ia sampaikan berisikan arahan terkait hal yang bersinggungan dengan komisinya, pembahasan raperda, sosialisasi perda, hingga sekadar memberi sambutan. Namun selesainya kegiatan, tak jarang para staff menghampiri Salmiah secara informal untuk menyampaikan beberapa keluhan terkait *miss*-koordinasi ataupun sekadar memberikan informasi bahwa ada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

2. Pola Komunikasi Politik Salmiah Rambe

Pola komunikasi politik yang Salmiah Rambe gunakan dalam mempertahankan elektabilitasnya merupakan pola komunikasi secara sirkular (*circular*) yang dikembangkan oleh Charles E.Osgood dan Wilbur Schramm (Efenndy dalam Hasibuan, M. A, 2019)

dengan menitikberatkan pembahasan pada perilaku pelaku-pelaku utama dalam proses komunikasi. Dalam pola komunikasi sirkuler, mekanisme umpan balik dalam komunikasi dilakukan antara komunikator dan komunikan saling mempengaruhi antara keduanya yaitu sumber dan penerima secara bergantian bertindak sebagai komunikator/sumber dan komunikan/penerima.

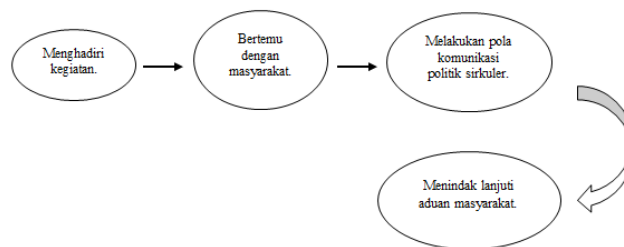
Peran dalam proses komunikasi antara Salmiah Rambe dengan masyarakat dapat bertukar-tukar. Salmiah Rambe akan berperan sebagai komunikator/sumber ketika menjadi pembicara di sebuah kegiatan atau ketika menyosialisasikan peraturan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan masyarakat/konstituen akan menjadi komunikan. Kemudian setelah masyarakat/konstituen mengartikan pesan yang disampaikan oleh Salmiah, mereka akan memberikam umpan balik seperti penyampaian pesan terkait aduan atau keresahan yang dirasa. Ketika penyampaian pesan terkait aduan yang dirasakan oleh masyarakat/konstituen, maka mereka akan bertindak sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan kepada Salmiah Rambe yang berperan sebagai komunikan. Salmiah akan mengartikan dan menginterpretasikan pesan yang diterimanya dan jika ada tanggapan/reaksi, ia akan membentuk pesan dan menyampaikannya kembali kepada masyarakat/konstituen.

Pola komunikasi tersebut juga Salmiah salurkan dalam kegiatan formal pemerintahan. Sebagai anggota dewan, Salmiah memiliki kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan rutin yaitu *reses* yang tercantum dalam Perwal Kota Bandung Nomor 444/2018 tentang tujuan *reses*. Dari kegiatan *reses* tersebut menghasilkan beberapa kebutuhan masyarakat yang dapat diserap oleh Salmiah di antaranya: Peningkatan kapasitas masyarakat dengan berbagai pelatihan, Perbaikan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (P JL), dan Sarana Air Bersih. Hasil yang didapatkan dari proses tanya jawab ketika kegiatan dan penyebaran form aspirasi kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan *reses* merupakan fasilitas untuk mengakomodir aspirasi peserta *reses* yang tidak tersampaikan pada saat proses tanya jawab. Hasil dari form aspirasi tersebut direkap oleh Tim Salmiah untuk di-*input* pada website Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), lalu data tersebut akan diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung (Bappelitbang Kota Bandung), setelah melalui proses verifikasi maka aspirasi-aspirasi tersebut disebarkan kepada dinas-dinas terkait untuk direalisasikan. Sebagai salah satu fungsi dari anggota dewan adalah melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan untuk memastikan apakah dinas-dinas telah berhasil merealisasikan aspirasi-aspirasi tersebut dan meninjau anggaran yang dikeluarkan.

Salmiah Rambe sebagai anggota dewan selalu bersikap membuka diri terhadap seluruh lapisan masyarakat, untuk menerima keresahan yang disampaikan. Selain memanfaatkan kegiatan resmi dalam penyerapan aspirasi atau berkomunikasi dengan masyarakat, Salmiah kerap memberikan nomor telepon pribadinya kepada masyarakat agar mereka dapat berkomunikasi secara langsung tanpa melalui perantara agar Salmiah dapat langsung menindak lanjuti kesulitan yang dihadapi masyarakatnya. Banyaknya pesan dan aduan yang masuk terkadang membuat Salmiah pada akhirnya tidak dapat mengakomodir beberapa aduan. Akhirnya, Salmiah mengklasifikasikan aduan tersebut menjadi dua hal; bantuan melalui financial secara pribadi, dan bantuan yang disambungkan pada pihak lain. Pihak lain di sini dalam artian dinas terkait yang dapat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya, misal apabila permasalahan yang diadukan berhubungan dengan pendidikan, maka yang disambungkan adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Ketika selesai menjadi pembicara dalam sebuah kegiatan baik formal maupun non-formal, seringkali masyarakat baik itu staff instansi pemerintahan maupun masyarakat biasa menghampiri Salmiah Rambe untuk berbicara secara pribadi membicarakan permasalahan yang mereka alami. Serperti halnya ijazah sekolah yang tertahan, ketidak mampuan untuk

membayar biaya rumah sakit untuk melakukan operasi, beasiswa yang tidak cair, dan berbagai permasalahan lainnya di bidang pendidikan maupun kesehatan sesuai dengan cakupan bidang Komisi D di DPRD Kota Bandung, Salmiah selalu berupaya untuk membantu perihal birokrasi maupun advokasi. Pada pola komunikasi tersebut maka ketika Salmiah membuat dan menyampaikan pesan (*encoding*) maka masyarakat akan memaknai pesan-pesan tersebut (*decoding*). Setelah masyarakat memaknai pesan tersebut maka masyarakat akan menciptakan pesan (*encoding*) untuk disampaikan kembali pada Salmiah, dan Salmiah akan memaknai pesan (*decoding*) yang disampaikan oleh masyarakat untuk menghasilkan *output* yang diharapkan, seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Pola Komunikasi Salmiah Rambe

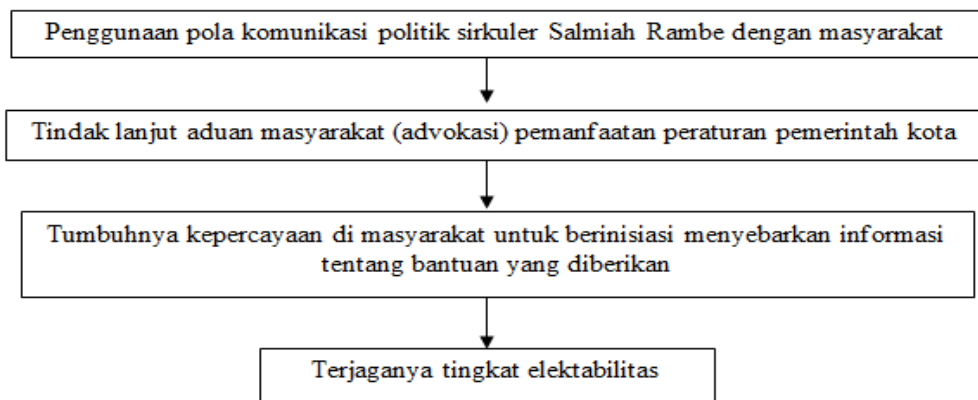
Dengan pola komunikasi tersebut Salmiah dapat dengan mudah bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga ia dapat membuat kebijakan dengan tepat guna dan membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam penggunaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota. Ketika mendapat aduan Salmiah akan menindaklanjuti dengan langsung menghubungi dinas terkait, masyarakat diarahkan untuk mengikuti prosedur yang seharusnya.

Menyebarnya informasi terkait bantuan yang diberikan oleh Salmiah maka hal tersebut memperluas jangkauan informasi tentang kinerja Salmiah selama menjabat sebagai anggota dewan, maka dengan begitu peneliti melihat bahwa hal tersebut dapat berdampak pada tingkat keterpilihan beliau. Elektabilitas atau tingkat keterpilihan seseorang dilihat dari kesesuaian kriteria keterpilihan seperti; bagaimana ia dikenal baik oleh masyarakat luas, memiliki rekam jejak yang baik, memiliki prestasi yang baik, juga terbukti memiliki kinerja yang baik. Maka dengan begitu, pola komunikasi politik yang telah dilakukan oleh Salmiah Rambe akan mempengaruhi tingkat elektabilitasnya

Pada Pemilu 2019, raihan suara Salmiah Rambe mencapai kenaikan hampir 300%. Hal tersebut tidak luput dari pendekatan pola komunikasi politik yang telah dilakukannya. Pola komunikasi politik tersebut dilakukan mulai dari Pemilu 2014 hingga saat ini. Dengan melihat hasil dari pola yang digunakan, apabila Salmiah terus berupaya meningkatkan pola tersebut maka Salmiah memiliki peluang dan permulaan yang cukup gemilang untuk maju kembali menjadi calon pemangku kebijakan di Pemilu 2024 mendatang. Dengan kekuatan 11 ribu suara di daerah pemilihannya yang sudah Salmiah pegang, merupakan modal awal yang cukup untuk bersaing di kompetisi Pemilu 2024 dengan banyaknya pesaing baru dimana partai yang ikut berkontestasi bertambah sebanyak 4 partai dari Pemilu 2019 silam, sebagai pemain lama tentu hal tersebut dapat menjadi sebuah modal. Pada dasarnya Salmiah beserta tim telah mengetahui dengan jelas target yang cocok atau relevan dengan Salmiah sehingga mereka tinggal memperluas daerah yang dimasuki, karena Salmiah telah konsisten pada citra dirinya sebagai *ustadzah* sehingga tidak begitu sulit dalam memilah target yang relevan.

Salmiah telah menggunakan pola komunikasi politik sirkuler sebagai anggota legislatif periode 2014 dan 2019 untuk menjaga tingkat elektabilitas yang ia miliki dengan

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mulai dari usaha Salmiah yang tetap mempertahankan dan meningkatkan popularitasnya di tengah masyarakat dengan berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Kota Bandung baik daerah pemilihannya maupun tidak, konsisten dengan citra diri yang melekat sebagai *ustadzah*, terus berusaha mempertahankan kinerjanya selama menjabat menjadi Anggota DPRD, serta loyalitas yang dimiliki oleh Tim Suksesnya juga turut membantu Salmiah mempertahankan tingkat elektabilitas melalui pelaksanaan strategi-strategi yang telah dan akan dibuat untuk terus menunjang tingkat keterpilihannya, seperti terlihat dalam gambar di bawah:



Gambar 2. Pola Komunikasi Politik Mempengaruhi Tingkat Elektabilitas

Pada rekap hasil pemilu 2019, suara yang diraih Salmiah Rambe di daerah pemilihannya meningkat hingga hampir tiga kali lipat dari pemilu sebelumnya. Pada tahun 2014, Salmiah memperoleh raihan suara sebanyak 4.219 sedangkan pada tahun 2019, ia mendapatkan suara sebanyak 11.074. Jumlah raihan tersebut meningkat dengan signifikan dibanding dengan pemilu sebelumnya. Perbedaan raihan suara tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor; pertama, karena jumlah pemilih yang terus bertambah; kedua, karena ia berhasil mempertahankan elektabilitasnya. Kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain, bagaimana Salmiah Rambe mengupayakan bertahannya tingkat keterpilihan yang ia miliki sehingga dapat menguasai jumlah pemilih dengan jumlah yang cukup banyak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pola komunikasi politik yang Salmiah Rambe gunakan berbentuk pola komunikasi politik sirkuler melalui mekanisme umpan balik antara Salmiah Rambe sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan saling mempengaruhi antara keduanya, dimana masing-masing pelaku secara bergantian bertindak sebagai komunikator/sumber dan komunikan/penerima. Pola komunikasi politik tersebut telah Salmiah gunakan sedari periode awal di tahun 2014 hingga saat ini diterapkan dan disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang disambanginya ketika bertemu dengan masyarakat/konstituen baik kegiatan formal maupun non-formal. Umpan baliknya, Salmiah mendapatkan informasi terkait apa yang menjadi keresahan atau aduan masyarakat/konstituen, sehingga mengetahui hal apa yang harus dilakukan dan diberikan kepada masyarakat/konstituen. Selain menghasilkan kebijakan atau bantuan bagi masyarakat/konstituen, pola komunikasi tersebut telah membantu Salmiah dalam mewujudkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan visinya dalam berpolitik yaitu “memperjuangkan kepentingan masyarakat dan ummat, untuk kebaikan serta keselamatan dunia akhirat”.

Pola komunikasi yang dilaksanakan Salmiah menghasilkan kebijakan atau bantuan yang diberikannya kepada masyarakat. Hadirnya kebijakan dan bantuan berkorelasi menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat/konstituen, sehingga mereka berinisiasif untuk menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat lainnya yang memengaruhi tingkat keterpilihan Salmiah. Dampak informasi yang tersebar di masyarakat membantu Salmiah meningkatkan popularitasnya dan memberikan rekam jejak positif. Hal tersebut merupakan modal awal bagi Salmiah untuk mengikuti kembali kontestasi Pemilu di 2024 mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Anwar, M. (2015). Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Elektabilitas Pada Pilkada 2015 Di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3, 429-430.
- Gulo, D. J., Simamora, P. R. T., & Sukatendel, R. (2022). Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2), 93-103.
- Herdayati, S. P., Pd, S., & Syahril, S. T. (2019). Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689-1699.
- Jone, Y. M. R. (2022). Strategi Komunikasi Petahana Dalam Mempertahankan Elektabilitas Pada Pilkada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Di Kecamatan Muara Lawa.
- Nurussa'adah, E., & Sumartias, S. (2017). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43-52.
- Rahardjo, M. (2017). Desain penelitian studi kasus: Pengalaman empirik. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Unpublished)
- Satinih. (2021). Analisis Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer Sebagai Bahan Ajar Siswa Kelas Xii Sma Negeri 1 Anjatan. Skripsi(S1) Thesis, Fkip Unpas.
- Supit, M., Lopian, M. T., & Tulung, T. E. (2022). Peran Media Sosial dalam meningkatkan Elektabilitas Calon Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kecamatan Bolaang Mongodow). *Jurnal Eksekutif*, 2(1).

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Perwironegoro, R. (2018). *Teknik Komunikasi Politik Ridwan Kamil Terkait Pembatalan Pencalonan Gubernur Dki Jakarta.(Analisis Isi Pada Akun Ridwan Kamil Di Facebook)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). (gaya komunikasi sama efektif)
- Siregar, N. A. (2018). Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrat Dalam Memenangkan pemilihan Kepala Daerah Kotapekanbaru 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sri, W. (2019). Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019 (Studi Kajian Di Kpu Kota Mataram) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Buku Teks

- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya, hal 30.
- Hasibuan, M. A. (2019). Komunikasi Sirkular (Circular Theory). *Network Media*, 2(1).

- Heryanto, Gun Gun & Shulhan R. 2013. Komunikasi Politik Sebuah Pengantar. Bogor : Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 3.
- Mulyana, D. 2013. Komunikasi Politik, Politik Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2007. Political Communication and Public Opinion in America (Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media), Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurudin. 2012. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hal 28.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. Komunikasi Politik Hubungan Antara Khalayak dan Efek, Sebuah Pengantar Dalam Dan Nimmo, Komunikasi Khalayak dan Efek. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sumber Internet

- Ambar. 2018. Model Komunikasi Interaksional – Komponen – Konsep – Kritik. <https://pakarkomunikasi.com/model-komunikasi-interaksional>. Diakses 5 Januari 2023.